

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Pengabdian No. 1 Telp. (0922) 2221001,2221002,2221005
Fax (0922) 2221505 E-Mail : Info@halbarkab.com, Halbarkab@yahoo.com
Website : [www. Halbarkab.Com](http://www.Halbarkab.Com)

J A I L O L O

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 172 /KPTS/ 1X / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM)
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) di Kecamatan Tahun Anggaran 2017 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) di Kecamatan Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;;
3. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
4. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;




8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabarana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) di Kecamatan Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebankan pada pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 September 2017

An. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Pejabat	Paraf
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Organisasi	


Drs. SYAHRIL ABD. RADJAK. Msi
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19660420 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.**
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 3. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 172 /KPTS / 2017
 TANGGAL : 14 September 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI RENCANA
 AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) DI KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 2.000.000
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 2.000.000
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	Rp. 1.900.000
4	Ass. Bid. Pemerintahan & Adm Umum	Koordinator	Rp. 1.800.000
5	Ass. Bid. Eko Pembangunan & Kesra	Koordinator	Rp. 1.800.000
6	Kabag Hukum & Organisasi	Ketua	Rp. 1.750.000
7	Kasubag Perundang-undangan	Sekretaris	RP. 1.000.000
8	Fataha Idrus	Anggota	Rp. 500.000
9	Feri Arumajaya	Anggota	Rp. 500.000
10	Andi Nurhayati syamsu	Anggota	Rp. 500.000
11	Irawan s. Disi, SH	Anggota	Rp. 500.000
12	James Sumlang, SH	Anggota	Rp. 500.000
13	Fahria Abdullah, SS	Anggota	Rp. 500.000
14	Sri Wahyuni Yallow, SH	Anggota	Rp. 500.000
15	Bahtiar A. Kamis, SH	Anggota	Rp. 500.000
16	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	Rp. 500.000
17	Rina Rauf, SH	Pemegang Kas	Rp. 500.000
18	Mitto Danta	Anggota	Rp. 500.000
19	Sance L. Lalu	Anggota	Rp. 500.000
20	Novelina Luow	Anggota	Rp. 500.000
21	Lin Roba	Anggota	Rp. 500.000
22	Navratilova Latukolan	Anggota	Rp. 500.000
23	Iskandar Zulkarnain	Anggota	Rp. 500.000
24	Kartini Rondonuwu	Anggota	Rp. 500.000
25	Suryani Tausi, S.Ip	Anggota	Rp. 500.000
26	Iskandar M. Nur	Anggota	Rp. 500.000
27	Annastasia N. Ludu	Anggota	Rp. 500.000

An. BUPATI HALMAHERA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH

Pejabat	Paraf
Ass. Bid Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Organisasi	


Drs. SYAHRIL ABD. RADJAK. Msi
 Pembiria Utama Madya IV/d
 NIP. 19660420 199203 1 009

